
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Devita Sari¹, Nindi Aulia², Muhammad Rianto³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: devitaasari@gmail.com¹, aulianinda77@gmail.com², mrianto120@gmail.com³

Accepted: 25/11/2024; **Published:** 27/11/2024

ABSTRAK

Masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini perlu dievaluasi baik ditingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, kajian mengenai reformulasi strategi penanggulangan kemiskinan dalam tinjauan konstitusi perlu dan penting untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemberantasan kemiskinan oleh pemerintah yang akan dikaji dengan pendekatan ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dikumpulkan melalui studi literatur (*library research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan di Indonesia belum berhasil secara optimal karena pendekatannya yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan tidak mengatasi akar masalah kemiskinan yang lebih mendalam. Dalam perspektif Islam, kemiskinan adalah ujian yang harus dihadapi dengan perbaikan kualitas hidup dan penguatan solidaritas sosial melalui zakat, infaq, dan sedekah. Pengembangan UMKM dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kewirausahaan masyarakat miskin. Namun, bantuan langsung seperti BLT hanya memberikan solusi jangka pendek. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan diperlukan untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Kebijakan Pemerintah, Perspektif Syariah.

ABSTRACT

The high poverty rate in Indonesia shows that poverty alleviation programs so far need to be evaluated both at the national and regional levels. Therefore, a study on the reformulation of poverty alleviation strategies in a constitutional review is necessary and important to do. The purpose of this study is to analyze the government's poverty alleviation policy which will be studied using a sharia economic approach. The research method used is a qualitative approach collected through literature studies (library research). The results of this study indicate that poverty alleviation in Indonesia has not been optimally successful because its approach only focuses on the economic aspect and does not address the deeper roots of poverty. From an Islamic perspective, poverty is a test that must be faced by improving the quality of life and strengthening social solidarity through zakat, infaq, and sedekah. The development of MSMEs can be a solution to improve the entrepreneurial skills and knowledge of the poor. However, direct assistance such as BLT only provides short-term solutions. Therefore, an empowerment approach that focuses on the development of human resources and institutions is needed to overcome poverty sustainably.

Keywords: Poverty, Government Policy, Sharia Perspective.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sangat penting untuk dikurangi bahkan dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Apabila tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mengentaskannya, maka suatu bangsa atau negara akan mengalami keterbelakangan. Keterbelakangan dalam pembangunan fisik, pembangunan sumber daya manusia serta pembangunan perekonomian akan menyebabkan negara tersebut dikuasai oleh negara-negara lain yang lebih maju. Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemiskinan dipahami sebagai keadaan seseorang atau sekelompok orang kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup (Rizky, 2021).

Masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini perlu dievaluasi baik ditingkat nasional maupun daerah. Beberapa contoh program penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional diantaranya adalah program bantuan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dalam bidang pangan, Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) untuk bidang kesehatan, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan banyaknya program penanggulangan kemiskinan tersebut, tetapi jumlah penduduk miskin masih tinggi, maka diperlukan evaluasi secara terintegrasi.

Oleh karena itu, kajian mengenai reformulasi strategi penanggulangan kemiskinan dalam tinjauan konstitusi perlu dan penting untuk dilakukan. Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemberantasan kemiskinan oleh pemerintah yang akan dikaji dengan pendekatan ekonomi syariah. Upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.

Upaya pengentasan kemiskinan semacam itu tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga dilakukan di Negara-negara lain. Salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh negara lain terjadi di Bangladesh dan diprakarsai oleh Muhammad Yunus melalui program Grameen Bank (Bank Desa). Konsep Grameen Bank dilaksanakan melalui penyaluran kredit mikro yang ditujukan untuk golongan masyarakat kaum miskin (khususnya perempuan) di pedesaan (Supriyanto, 2006).

Al-Qur'an memandang bahwa kemiskinan adalah masalah sosial yang harus dientaskan. Bahkan penyakit berbahaya yang wajib diobati. Tulisan ini akan membahas model pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kaum fakir dan miskin yang ditawarkan Al-Qur'an untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dikumpulkan melalui Studi Literatur (*Library Research*) untuk menganalisis teori ekonomi Islam yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, serta mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia dari perspektif tersebut. Teknik analisis data menggunakan triangulasi yakni, (1) pengumpulan data dari berbagai sumber literature seperti buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya (2) menganalisis data, (3) penarikan kesimpulan yang tujuannya adalah untuk menganalisis kebijakan pemberantasan kemiskinan oleh pemerintah yang akan dikaji dengan pendekatan ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Kemiskinan

Menurut Prof. Dr. Ir. H. Zulkifli Sjamisyir, menyatakan bahwa Kemiskinan merupakan salah satu masalah paling berpengaruh terhadap timbulnya masalah sosial. Masalah sosial yang bersumber dari kemiskinan dan kesenjangan atau kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok, sering kali tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dengan faktor lain. Kemiskinan bukan saja menjadi masalah di Indonesia, tetapi juga di banyak negara berkembang.

Kemiskinan juga mempengaruhi orang bertindak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, meskipun tindakan tersebut kadang bertentangan dengan aturan atau norma-norma yang sudah ada atau pun berkaitan dengan kerusakan lingkungan (Manongga, 2018).

Robert Malthus berpendapat bahwa Pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan salah satu penyebab terjadinya kemiskinan yang akan mempengaruhi kebutuhan pangan dan berbagai produksi lainnya untuk mencukupi kebutuhan manusia. Hal ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang mengikuti deret ukur tidak akan pernah terkejar oleh penambahan makanan dan pakaian yang hanya mengikuti deret hitung (Soerjani, 1997).

Pada umumnya kemiskinan itu dapat diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok minimal suatu negara, yang akan berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Penanggulangan kemiskinan selama ini terjadi memperlihatkan kegagalan, karena pengentasan kemiskinan yang sering berubah dalam permasalahan ekonomi semata tidak akan dapat mewakili persoalan yang mendasar dari kemiskinan yang sebenarnya (Arif, 2016).

Penelitian Sartiyah yang berjudul Perspektif Kemiskinan Masyarakat di Daerah Pesisir menjelaskan bahwa dalam penanggulangan kemiskinan yang baik memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak kepentingan. Seperti, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat yang memiliki tanggung jawab yang sama terhadap masalah mengentaskan kemiskinan (Sartiyah, 2011).

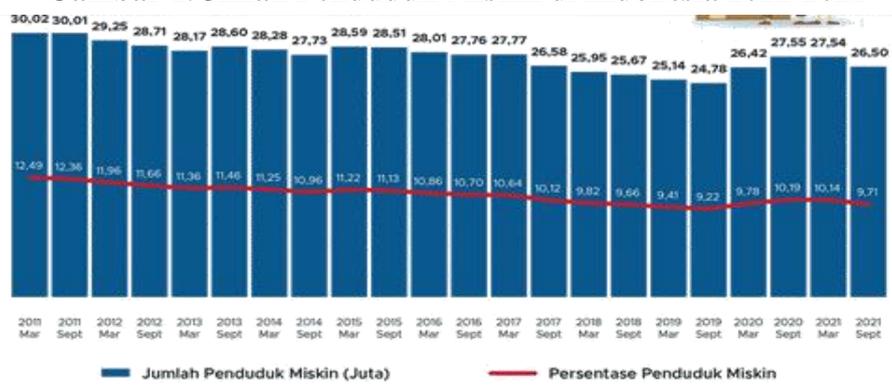
Pengertian pengentasan kemiskinan ini jika dilihat dari teori kemiskinan situasional adalah teori yang berkeyakinan bahwa orang miskin yang berperilaku berbeda dengan masyarakat pada umumnya, karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk mengikuti gaya hidup mereka yang berkelas atas (masyarakat yang hidup mewah). Apabila kondisi sosial ekonomi mereka diperbaiki, dengan menghilangkan deskriminasi sosial dan memberikan peluang yang sama, maka mereka akan mampu menyamakan posisinya dengan orang-orang kaya (Suharto, 2015).

Dikarenakan kemiskinan faktor penyebabnya berbeda-beda, maka upaya penanganan antara kesenjangan natural dengan kesenjangan struktural pun berbeda, yang mana kesenjangan natural ini dapat diatasi dengan membuka pintu untuk mobilitas sosial seperti zakat, infak, dan sedekah dapat menjadi efektif dalam masalah kesenjangan natural ini. Sedangkan untuk mengatasi kesenjangan struktural yaitu dengan keterlibatan unsur politik yang menjadi faktor utamanya, dan negara bertanggung jawab untuk mengaturnya sehingga kesenjangan struktural ini dapat teratasi.

Jadi, masalah kemiskinan ini adalah suatu masalah yang disebabkan oleh faktor keturuanan yang bawaan sejak lahir, bentuk ketidakadilan, dan faktor orang-orang yang enggan memberikan separuh dari harta mereka kepada yang membutuhkan ataupun sebab-sebab lainnya.

Kontribusi UMKM dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia

Gambar 1. Jmlah Penduduk Miskin di Indonesia 2011-2021



Sumber: BPS

Menurut data BPS pada September 2021 terdapat 26,50 juta orang di Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional dan banyak lagi yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar. Persentase pada bulan September 2021 sebesar 9,71 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,48 persen poin terhadap September 2020. Dibanding Maret 2021, jumlah penduduk miskin September 2021 perkotaan turun sebanyak 0,32 juta orang (dari 12,18 juta orang pada September 2021). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 0,73 juta orang (dari 15,37 juta orang pada maret 2021 mejadi 14,64 juta orang pada September 221). Garis kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp.486 168,-/kapita/bulam dengan komposisi sebesar Rp.360.007,- (74,05 persen) dan garis Kemiskinan bukan makanan sebesar Rp.126.161,-(25,95 persen). Pada September 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,50 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp.2,187.756,-/rumah tangga miskin/bulan (BPS, 2021).

UMKM dianggap sebagai cara alternatif untuk mengatasi beberapa masalah sosial ekonomi yang membingungkan beberapa negara saat ini, terutama masalah pengangguran tinggi dan kemiskinan. UMKM adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dalam perekonomian. Pengembangan UMKM adalah proses meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kewirausahaan melalui pelatihan terstruktur dan program pembangunan kelembagaan yang difokuskan pada individu yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis. Salah satu tantangan utama yang dihadapi negara-negara berkembang dan terbelakang di dunia adalah kemiskinan. Sudah begitu endemik sebagai akibat tingginya tingkat pengangguran yang menjadi ciri utama negara berkembang. Data Pertumbuhan UMKM di Jawa Tengah. Sebagai ilustrasi, kita bisa mengambil apa yang terjadi di Jawa Tengah. Hal ini memperlihatkan adanya pertumbuhan jumlah UMKM yang menjadi binaan pemerintah. Jika dibaca maka penambahan tertinggi terjadi ketika tahun 2013 hingga tahun 2014 dengan jumlah 4131 unit usaha. Untuk tahun 2017 sampai tahun 2018 juga terjadi peningkatan yang baik, yakni pada angka 3575 buah unit usaha. Pertumbuhan unit usaha yang ‘flat’ dalam kurun satu dekade lebih ini terjadi tahun 2009 hingga 2010 yang hanya 114 unit usaha saja.

UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. UMKM telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. etika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis. Bisnis UMKM menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) sekitar 60% dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Posisi kredit UMKM pada bank umum.

UMKM bisa menjadi alternatif meningkatkan taraf hidup masyarakat di dunia. Masyarakat-masyarakat yang termasuk kategori miskin diberikan pelatihan dan bantuan modal untuk menjalankan UMKM. UMKM adalah pelopor kumpulan ide-ide baru dari proses baru yang mempercepat peningkatan berdasarkan penggunaan sumber daya yang lebih efektif. Peran usaha kecil dan menengah diakui di seluruh dunia karena kontribusi unik mereka terhadap pembangunan ekonomi. Baik negara maju maupun negara yang dalam proses pembangunan menyadari bahwa UMKM dan pengusaha memainkan peran penting dalam perkembangan industri suatu negara. Jadi tidak mengherankan bahwa para ahli strategi politik sering berpikir bahwa UMKM dapat menjadi "benih" kebangkitan ekonomi (Indika, 2019).

Beberapa poin penting rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia untuk pengembangan UMKM di Indonesia, antara lain: (1). Pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) harus berdasarkan kondisi dan permasalahannya di masing masing daerah. (2) Menyusun database UMKM Indonesia dengan menggunakan kriteria tenaga kerja sebagai basis identifikasi UMKM agar data UMKM dapat disandingkan dengan negara-negara lain. (3) Perlindungan terhadap desain produk yang dihasilkan UMKM dengan mempermudah hak paten. (4) Meningkatkan dukungan dalam pengembangan produktivitas UMKM (contohnya pengembangan inovasi, pelatihan manajerial dan tenaga kerja) melalui peningkatan belanja pemerintah terkait peningkatan produktivitas UMKM (5) Pengoptimalan teknologi informasi untuk meningkatkan akses pemasaran dan dilakukan kerja sama antara lembaga bisnis dengan sektor swasta, perguruan tinggi, lembaga riset maupun lembaga keuangan, dan menyusun kebijakan untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital bagi UMKM selain e-commerce, terutama dalam penggunaan program *software* yang mendukung kinerja UMKM (6) Memperkuat dan meningkatkan partisipasi UMKM melalui kerja sama yang dilakukan antara UMKM dan perusahaan multinasional yang diberi insentif pajak (Kholif, 2014).

Strategi dan Program Kerja Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia

Memahami dan upaya menangani kemiskinan memang menarik untuk disimak. Dalam teori ekonomi mengatakan bahwa untuk memutus mata rantai lingkaran kemiskinan dapat dilakukan peningkatan keterampilan sumber daya manusianya, penambahan modal investasi, dan mengembangkan teknologi. Melalui berbagai suntikan maka diharapkan produktifitas akan meningkat. Namun, dalam praktek persoalannya tidak semudah itu. Lantas apa yang dapat dilakukan? Program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di berbagai negara. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat program penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antarnegara bagian, memperbaiki kondisi pemukiman perkotaan dan pedesaan, perluasan kesempatan pendidikan dan kerja untuk para pemuda, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi orang dewasa, dan pemberian bantuan kepada kaum miskin usia lanjut. Selain program pemerintah, juga kalangan masyarakat ikut terlibat membantu kaum miskin melalui organisasi kemasyarakatan, gereja, dan sebagainya. Sedangkan di negara Indonesia sebenarnya dari uraian di atas juga melakukan upaya yang hampir sama seperti yang dilakukan di Amerika Serikat, mungkin tingkat komprehensifitasnya yang masih diperlukan. Penanganan kemiskinan di Indonesia masih didominasi sektor ekonomi, belum begitu menyentuh aspek lain seperti sosial, budaya, hukum dan politik, bahkan agama (Suroyo, 2006).

Kekeliruan paradigma dalam memahami kemiskinan tentu menyebabkan adanya analisis yang keliru, artinya seharusnya memunculkan variabel- variabel yang signifikan untuk menganggulangi kemiskinan justru variabel yang tidak signifikan dimasukkan, sehingga estimasi bias dan hasil yang diharapkan tidak terjadi. Mencermati beberapa kekeliruan paradigmatis penanggulangan kemiskinan tadi, ada strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan (Huraerah, 2005):

1. Karena kemiskinan bersifat multidimensional, maka program pengentasan kemiskinan seyogyanya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tapi memperhatikan dimensi lain.
2. Untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja (*networking*), serta informasi pasar

3. Melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan.
4. Strategi pemberdayaan. Kelompok agrarian populism yang dipelopori kelompok pakar dan aktivis LSM, menegaskan, masyarakat miskin adalah kelompok yang mampu membangun dirinya sendiri jika pemerintah mau memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur dirinya.
5. Strategi yang bersifat bantuan langsung (BLT) ke masyarakat miskin yang diselenggarakan selama ini sangat bersifat jangka pendek dan itu sebenarnya menurut pengalaman di negara maju seperti misalnya Amerika Serikat, BLT hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar tidak berdaya. Strategi yang dikembangkan yang berorientasi jangka panjang adalah justru bantuan tidak langsung yang bersifat pemberdayaan. Misalnya, program peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja/usaha melalui pendidikan dan latihan-latihan kerja, perluasan jaringan usaha (networking), informasi pasar, dan bantuan modal kerja.

Langkah Islam Mengatasi Kemiskinan

Allah SWT sesungguhnya telah menciptakan manusia, sekaligus menyediakan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan tidak hanya manusia; seluruh makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakan, pasti Allah menyediakan rizki baginya. Tidaklah mungkin, Allah menciptakan berbagai makhluk, lalu membiarkan begitu saja tanpa menyediakan rizki bagi mereka (Mujahidin, 2008).

Secara umum ada tiga gejala kemiskinan, yaitu: a) kemiskinan natural; b) kemiskinan kultural; dan c) kemiskinan struktural. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang dialami oleh seseorang sejak lahir, dikarenakan terlahir dari keluarga miskin, dan hidup dalam lingkungan miskin. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor kultural, seperti gaya hidup malas bekerja sehingga terjebak dalam jurang kemiskinan. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya sistem atau struktur yang mencegah sebagian besar orang untuk menjadi kuat, sejahtera, bahkan kaya (Suroyo, 2006).

Kemiskinan merupakan “penyakit ganas” yang akan berdampak negatif tidak hanya pada kehidupan perindividu tetapi juga pada aqidah, pemikiran, kebahagiaan rumah tangga, dan kehidupan sosial. (Yusuf Qaradhawi, 2002). Adapun islam dalam rangka merealisasikan pengentasan kemiskinan ini adalah dengan: (1) bekerja, (2) jaminan dari family terdekat yang mampu, (3) zakat, (4) jaminan Negara dari berbagai sumber yang diperoleh, (5) kewajiban material tambahan selain zakat, (6) sumbangan suka rela dan kesadaran individual (Yusron, 2018).

KESIMPULAN

Penanggulangan kemiskinan selama ini terjadi memperlihatkan kegagalan, karena pengentasan kemiskinan yang sering berubah dalam permasalahan ekonomi semata tidak akan dapat mewakili persoalan yang mendasar dari kemiskinan yang sebenarnya. Jika kemiskinan ini semakin merajalela, maka kemiskinan ini akan membuat lupa adanya Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama. Dalam pandangan Islam, kemiskinan bukanlah suatu kenikmatan, ia merupakan satu bentuk ujian hidup. Islam telah merekomendasikan untuk mendorong peran setiap individu dalam meningkatkan kualitas hidup dan mendorong kohesi sosial melalui zakat, infaq dan shadaqah.

Untuk pengentasan kemiskinan maka dikembangkan UMKM karena dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kewirausahaan melalui pelatihan terstruktur dan program pembangunan kelembagaan yang difokuskan pada individu yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis. Masyarakat-masyarakat yang termasuk kategori

miskin diberikan pelatihan dan bantuan modal untuk menjalankan UMKM.

Penanganan kemiskinan di Indonesia masih didominasi sektor ekonomi, belum begitu menyentuh aspek lain seperti sosial, budaya, hukum dan politik, bahkan agama. Strategi yang bersifat bantuan langsung (BLT) ke masyarakat miskin yang diselenggarakan selama ini sangat bersifat jangka pendek karena hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar tidak berdaya. Strategi yang dikembangkan yang berorientasi jangka panjang adalah justru bantuan tidak langsung yang bersifat pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N. (2021). Respons Agama terhadap Kemiskinan: Perspektif Sosiologi. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 2(1), 47-59.
- Andiny, P., & Nurjannah, N. (2018). Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa. *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 31-37.
- Aprianto, N. E. K. (2018). Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2).
- Azizah, U. S. A. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kota Bandar Lampung Periode 2010-2018.
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Claudia, A., & Rosyadi, I. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Praktik Musaqah Kebun Karet di Desa Kembang Kuning Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Hermawan, H. (2019). *Tinjauan Hukum Islam terhadap penjualan barang dalam sistem dropshipping (Studi kasus pada batik hasta Simbang Wetan no 19 Buaran Kab. Pekalongan)* (Doctoral dissertation, IAIN Pekalongan).
- Indika, M., & Marliza, Y. (2019). Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. *MBIA*, 18(3), 49-66.
- Kholif, K. I. (2014). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Lazim, A. (2016). *Praktik transaksi jual beli cetak (kerajinan tangan) di Desa Kelebeh Kecamatan Praya Tengah dalam perspektif ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Al Arif, M. N. R., & Amalia, E. (2016). *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Prenada Media.
- Manongga, A., Pangemanan, S., & Kairupan, J. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).
- Mubarok, A. F. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Oleh Grameen Bank. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 4(2), 105-119.
- Mujahidin, A. (2008). Pengentasan Kemiskinan Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 7(1), 168-184.
- Nur Yusron Karim (2018). Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Al- Qur'an Menurut Tafsir Al Azhar Karya Buya Hamka.
- Rachmawati, M. (2020). Kontribusi Sektor Umkm Pada Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(07), 113.
- Risal, M., & Siradjuddin, S. (2022). Meningkatkan Peran Usaha Kecil dan Mikro Syariah dalam Mengatasi Kemiskinan. *Jurnal Sosial Sains*, 2(2), 223- 229.
- Rizki, M. (2021). Dampak Program Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan di

- Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Good Governance*, 17(2).
- Sartiyah. (2011). Perspektif Kemiskinan Masyarakat di Daerah Pesisir. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Nomor 1*, (2011), hlm. 61.
- Saifullah Zulkifli, Metode Pengembangan Masyarakat Islam: Gradualisme dan konsesus. (2004). Banda Aceh: Ar-Raniry Press. 139.
- Setiawan, F., & Hasanah, I. (2016). Kemiskinan dan Pengentasannya dalam pandangan Islam. *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(2).
- Suharto, E. (2015). Peran perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia: Studi kasus program keluarga harapan. *Sosiohumaniora*, 17(1), 21-27.
- Supriyanto, S. (2006). Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 3(1), 17247.
- Suroyo. (2006). Agama dan Kepercayaan membawa Pembaruan. Yogyakarta: Kanisius, 97.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)